



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI

VOLUME I / TAHUN V 2023







Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.  
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.



**Diterbitkan oleh :** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Eka Fridayanti | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Alva Maulana Haqqani, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Ulil Hidayati | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

# DAFTAR ISI



## PENGANTAR MENKUMHAM

Optimisme Sambut Tahun Ekonomi Kreatif

4



## DJKI

DJKI Lanjutkan Capaian Tahun 2022



## SEKRETARIAT DJKI

Mewariskan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkesinambungan



## INFOGRAFIS

Capaian 2021-2022 Kinerja DJKI



## DIREKTORAT HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI

Anggoro Dasananto, Menolak Tergerus Arus

22



## DIREKTORAT MEREK & IG

Sejumlah Catatan Pencapaian Direktorat Merek & IG

26



## DIREKTORAT PATEN, DSLT, DAN RAHASIA DAGANG

Melihat Sisi Lain Tantangan & Potensi Pengembangan Paten di Tanah Air

30



## DIREKTORAT KERJA SAMA & PEMBERDAYAAN KI

Bersama-sama Memperkuat Sinergitas untuk Sukseskan Capaian 2023

34



## DIREKTORAT PENYIDIKAN & PENYELESAIAN SENGKETA

Ikhtiar Menegakkan Hukum Kekayaan Intelektual

38



## DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Mempersiapkan DJKI yang Responsif terhadap Transformasi Digital

42



## INFOGRAFIS

Narasi Pembuka Tahun 2023 sebagai Tahun Merek

46



## INFOGRAFIS

Program Unggulan DJKI Tahun 2023

48



Pengantar dari Menkumham, Yasonna H. Laoly

# Optimisme Sambut Tahun Ekonomi Kreatif 2023

Tahun 2022 merupakan masa yang sangat krusial bagi seluruh bangsa. Di tengah ancaman resesi global, pemerintah dan masyarakat Indonesia bahu-membahu untuk bangun setelah serangan Covid-19.

Sejak 2020, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyadari, ekonomi kreatif merupakan salah satu jalur perjuangan yang berpotensi 'menyembuhkan' Indonesia dari kondisi sulit pascapandemi. Hal ini mengingat, solusi konvensional tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan masyarakat yang harus *#stayathome* melindungi diri dan keluarga. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan potensi karya kekayaan intelektualnya melalui teknologi digital.



Foto:  
Dok. DJKI  
Kemenkumham

Yasonna Mendengar di Pendapi Gedhe Balai Kota Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada kegiatan ini, Menkumham Yasonna bersama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berdiskusi dengan para komunitas penghasil kekayaan intelektual dan masyarakat.

Tahun lalu, pada tahun tematik hak cipta, upaya digitalisasi itu bernama POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta). POP HC telah membantu lebih dari 117 ribu pencatatan ciptaan dengan waktu proses rata-rata kurang dari sepuluh menit. Upaya ini merupakan sebuah terobosan dari sistem pencatatan ciptaan yang sebelumnya bahkan baru selesai dalam waktu sembilan bulan.

Selain itu, DJKI telah membuka seluruh pendaftaran kekayaan intelektual secara *online*.

Masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor DJKI atau kantor wilayah saat ingin mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektualnya. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui [dgip.go.id](https://dgip.go.id). Konsultasi pun dibuka seluas-luasnya melalui semua *channel*, baik *online* maupun *offline*.

DJKI turun ke 33 provinsi di Indonesia untuk bertatap muka, memberikan konsultasi langsung kepada para pemohon KI melalui program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC). Bahkan, saya

ikut turun langsung dalam upaya membuka percakapan, berdiskusi, dan menyebarkan informasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual pada para pimpinan daerah dan komunitas kreatif. Usaha-usaha ini telah menghasilkan peningkatan pencatatan kekayaan intelektual mencapai 26,41% hingga 31 Desember 2022. Seluruh program DJKI 2022 berkontribusi sebesar Rp805 miliar pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

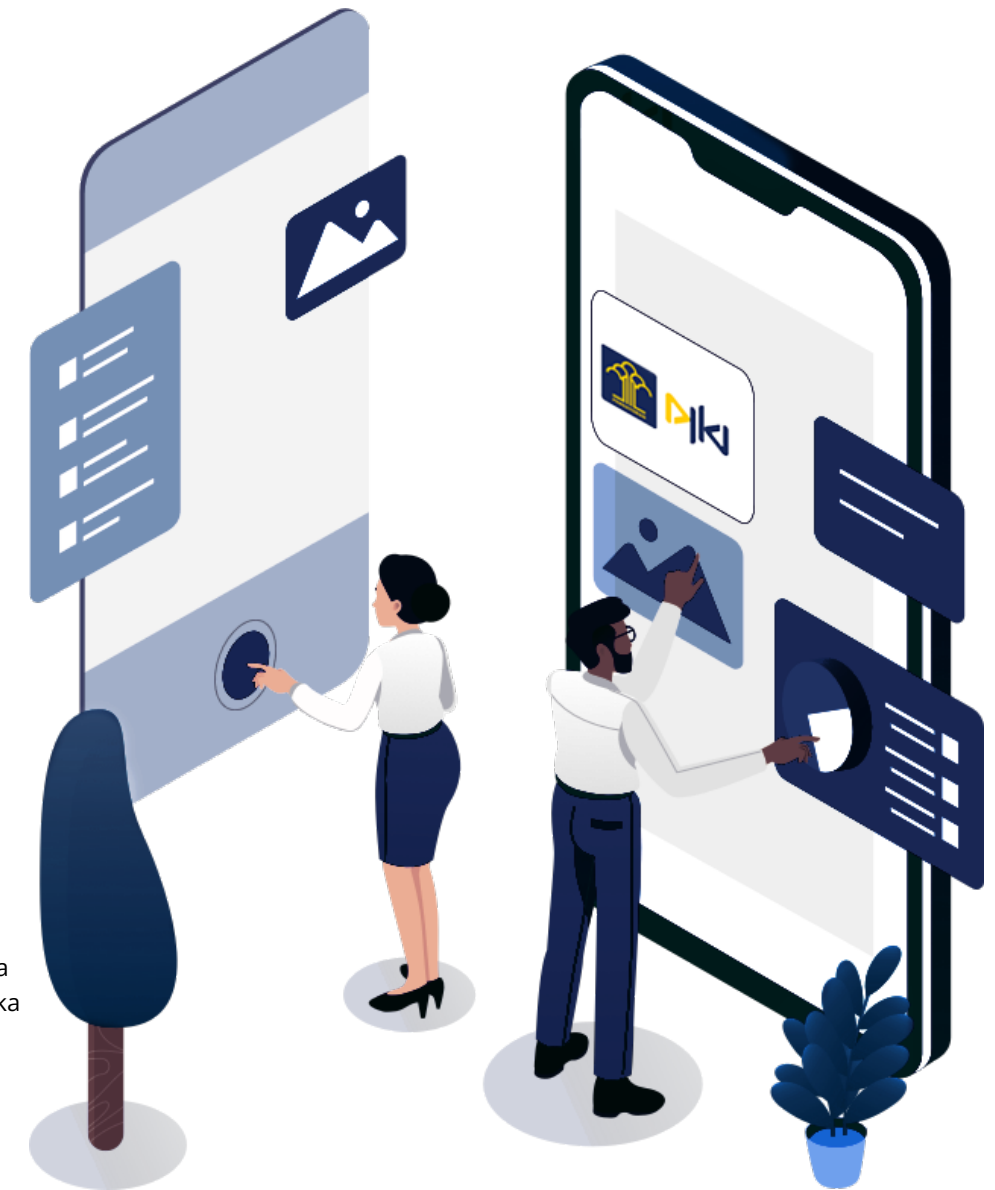


“DJKI juga masih akan kembali menyapa masyarakat, komunitas, akademisi, para pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingannya secara berkala.”

Tak hanya itu, kami juga memastikan penegakan hukum kekayaan intelektual dilaksanakan di lapangan. Berkat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, DJKI telah merekomendasikan penutupan 187 situs ilegal. Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sendiri telah secara aktif mensertifikasi 87 pusat perbelanjaan di 29 provinsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.

Pencapaian besar ini merupakan wujud dukungan nyata kami mendorong masyarakat Indonesia untuk memberdayakan diri mereka melalui karya intelektual. Maka saya sangat bangga saat DJKI memperoleh ‘*Top Digital Implementation 2022 Level Star 5*’ pada ajang Top Digital Awards 2022. Capaian ini juga telah memberikan saya dan Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu kesempatan untuk menerima penghargaan sebagai ‘*Top Leader on Digital Implementation 2022*’.

Kami belum akan berhenti. Pada edisi ini, Media HKI akan membahas lebih mendalam mengenai pencapaian 2022 serta 13 program unggulan DJKI untuk meningkatkan 17 persen peningkatan KI di seluruh Indonesia pada 2023 di Tahun Merek Nasional. Salah satunya, melalui aplikasi terbarunya yaitu Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP-Merek).



Pada Tahun Merek Nasional DJKI akan memperkenalkan salah satu program unggulannya, yaitu ‘One Village, One Brand’. Program ini secara spesifik dirancang untuk merangsang ekonomi daerah berbasis KI di setiap desa ataupun kabupaten dengan memiliki satu merek secara kolektif.

Selain itu, DJKI juga masih akan kembali menyapa masyarakat, komunitas, akademisi, para pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingannya secara berkala melalui Mobile IP Clinic

2023; Patent Examiner Goes To Campus; hingga Persiapan Perancangan Kawasan Karya Cipta 2024.





Foto: Dok. DJKI Kemenkumham  
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) NTB di Prime Park Hotel Mataram pada 1 September 2022.

# DJKI Lanjutkan Capaian Tahun 2022

Sejumlah kegiatan telah dipersiapkan, seperti One Village, One Brand; Mobile IP Clinic; Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP-Merek), dan masih banyak lagi.

Pada pengujung tahun, DJKI Kemenkumham mencatat kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah permohonan kekayaan intelektual.

Di mata Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham, Razilu, 2022 merupakan tahun yang amat istimewa. Pasalnya, pada pengujung tahun, DJKI Kemenkumham mencatat kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah permohonan kekayaan intelektual. Untuk pencatatan melalui POP-HC misalnya— total permohonan mencapai 117 ribu. Angka ini, naik sebanyak 41% dari tahun sebelumnya.

Situasi serupa juga terjadi pada permohonan merek. Dibanding tahun sebelumnya, ada kenaikan mencapai 16%, dengan total sebanyak 120.216 permohonan merek. Jika dihitung secara keseluruhan, ada 257.335 permohonan yang diterima oleh DJKI—26,41% lebih tinggi ketimbang tahun 2021.

Selain dari sisi angka, pada 2022, DJKI menerima tiga penghargaan dari ajang kompetisi TOP Digital Awards. Penghargaan ini diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham sebagai 'Top Leader on Digital Implementation 2022'; juga DJKI Kemenkumham sebagai 'Top Digital Implementation 2022 #LevelStar5' atas upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan KI secara online.

Dalam wawancaranya, Razilu mengungkapkan bahwa upaya melindungi KI akan terus dilakukan. Karena keberhasilannya,

sejumlah program yang telah diselenggarakan sepanjang 2022 pun akan dilanjutkan. Salah satunya, Mobile IP Clinic.

"Kemudian perkara yang serupa dengan Mobile IP Clinic, tapi kita menasar perguruan tinggi. Itu akan kita kolaborasikan, sekaligus dengan kegiatan hak cipta 'masuk kampus'. Untuk mendongkrak permohonan, jadi nanti akan menelusuri perguruan tinggi dan pusat-pusat penghasil kreativitas," kata Razilu.

Ada pula program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan; Roving Seminar Menkumham yang pada 2023, disebut Safari Menkumham; DJKI Mengajar; dan RuKI (Guru KI). Tujuannya, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

"Pada 2023, Safari Menkumham ini akan lebih ditargetkan audiensnya. Baik kalangan perguruan tinggi (kuliah umum), datang ke komunitas pegiat seni atau UMKM penghasil merek, atau audiens tertentu," Razilu menjelaskan.

## Menuju Program Unggulan 2023

Razilu memaparkan, setiap tahunnya DJKI Kemenkumham akan mengangkat satu tema. 2023 adalah 'Tahun Merek' yang bertujuan untuk merespons dan membangun kesadaran, cinta, maupun rasa bangga terhadap merek Indonesia. Sejumlah kegiatan telah dipersiapkan, seperti

One Village, One Brand; Mobile IP Clinic; dan Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP-Merek)

Pada One Village, One Brand, DJKI akan bekerja sama dengan seluruh mitra, kantor wilayah, dan dinas di setiap provinsi untuk mengidentifikasi produk khas yang dapat masuk ke pasar. Bagi produk yang belum memiliki merek, DJKI akan membantu untuk mengajukan merek secara kolektif.

2023 adalah 'Tahun Merek' yang bertujuan untuk merespons dan membangun kesadaran, cinta, maupun rasa bangga terhadap merek Indonesia.

"Jadi mereknya adalah merek kolektif. Tidak dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh satu komunitas dibantu oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan kita," Razilu melanjutkan.

Becermin dari keberhasilan program 2022, Razilu optimis pencapaian 2023 akan jauh lebih gemilang. Ia pun menguraikan langkah yang akan ditempuh, seperti membuat SK Menteri Hukum dan HAM terkait tim pelaksana program unggulan di DJKI. Harapannya, masing-masing pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi menyukseskan seluruh program unggulan.





Plt. Dirjen KI, Razilu pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun di Aula Oemar Seno Aji, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Pada momen ini, DJKI Kemenkumham juga memberikan sejumlah apresiasi kepada para pemohon kekayaan intelektual.

Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

“Saya sudah diskusi dan akan *bikin* tim pelaksana program unggulan di DJKI. Pak Menteri sebagai pengarah, karena di situ ada beberapa kluster yang membutuhkan koordinator,” ujar Razilu.

Koordinator ini akan dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama yang kompeten di bidang masing-masing. Anggotanya adalah lintas seluruh unit yang memiliki kapasitas dan kompetensi di masing-masing kluster,” ujar Razilu yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Langkah selanjutnya, yaitu evaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor perkembangan program, menilai perbaikan, dan melakukan peningkatan.

“Yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan tertinggi untuk terus mengawal ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi, pasti pimpinannya akan terus mengawal ini supaya bisa dieksekusi dengan baik. Selain itu, kita akan melibatkan seluruh mitra kerja, baik internal maupun eksternal unit,” Razilu menambahkan.

## Antigratifikasi

*Mengapa DJKI lebih banyak melakukan transformasi pada pelayanan seperti POP-HC dan POP Merek?*

Mulanya, ketika menjadi bagian DJKI, Razilu pernah mewawancarai sejumlah orang untuk mencari informasi. Pada saat itu, ia mengetahui bahwa pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi—yang awalnya direncanakan selesai dalam satu hari—mundur menjadi delapan hari, bahkan lebih dari satu bulan.

Hal yang sama, juga berlaku pada perpanjangan merek yang seharusnya membutuhkan waktu satu hari, tetapi jadi berhari-hari. Dari situ, DJKI kemudian memutuskan untuk mengupayakan satu perubahan: membuat persetujuan otomatis yang dapat selesai dalam hitungan menit. Dengan demikian, selain dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah, tingkat kepuasan masyarakat juga akan semakin tinggi.

“Yang paling penting, dalam kaitannya dengan pelayanan publik yang berintegritas ini, semua pegawai DJKI yang menangani urusan POP-HC dan POP-Merek tidak akan bertemu dengan pemohon. Jadi tidak ada tatap muka dan pungutan liar (pungli) gratifikasi. Karena tidak perlu datang, pemohon tidak perlu mengeluarkan ongkos macam-macam. Permohonan dapat dilakukan di mana saja, selama ada internet,” ucap pria kelahiran Buton, 28 November 1965.

Pada 23 November 2022, Menkumham Yasonna sendiri telah menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 kepada DJKI. Dengan hasil nihil temuan, seluruh pegawai DJKI telah terbukti dan ‘dijaga’ sedemikian rupa agar tidak melakukan penyimpangan dalam hal gratifikasi atau pungli, dalam kaitan dengan pencatatan hak cipta, perpanjangan merek, atau layanan POP lain.

Adapun perihal kesuksesan program DJKI tahun 2023, lulusan Program Pascasarjana Bidang Kajian Ketahanan Nasional ini meyakini, seluruhnya akan terlaksana dengan maksimal. Kepercayaan ini didasarkan pada pencapaian tahun 2022. Apalagi, dalam dunia internasional, DJKI Kemenkumham telah menduduki peringkat dua untuk pendaftaran merek di antara negara-negara yang tergabung dalam *middle income countries*—dengan lebih dari 127 ribu permohonan merek; juga masuk dalam peringkat sepuluh negara yang menyumbang sekitar 200 permohonan paten sederhana (*utility model*).

“Kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, strategi, dan komitmen yang konsisten, pasti hasilnya

akan memuaskan. Saya yakinkan kepada teman-teman semuanya, dari pengalaman tahun 2022 kita sudah berhasil, dan akan lebih baik lagi pada 2023 karena kita punya strategi tertentu. Saya mengajak teman-teman DJKI untuk bersinergi, berkolaborasi secara bersama-sama untuk menyukseskan seluruh program

DJKI. Program yang sukses, adalah sukses secara bersama-sama. DJKI pasti oke!” tutup Razilu.

**“Saya mengajak teman-teman DJKI untuk bersinergi, berkolaborasi secara bersama-sama untuk menyukseskan seluruh program DJKI. Program yang sukses, adalah sukses secara bersama-sama. DJKI pasti oke!”**





# Mewariskan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Salah satu fungsi penting Sekretariat DJKI Kemenkumham adalah memfasilitasi SDM di sejumlah direktorat teknis dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sekretaris DJKI Kemenkumham Sucipto memahami, salah satu fungsi penting Sekretariat DJKI Kemenkumham adalah memfasilitasi SDM di sejumlah direktorat teknis dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Fungsi ini, memang terkesan terlalu general. Namun, sisi baiknya, pada pengujung 2022, pihaknya mencatat ada banyak kontribusi yang telah diberikan, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM di internal.

November 2022, DJKI Kemenkumham berhasil meraih nilai 99,08 dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini didapat karena DJKI Kemenkumham berhasil mencapai target kinerja DJKI 2022.

“Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKI mendapatkan nilai 84,35 dan Indeks RB-nya 99. Ini adalah sebuah capaian yang patut kita apresiasi karena ini tidak mungkin

tercapai tanpa kerja keras dan sinergi kita bersama,” ujar Sucipto pada Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Selasa (29/11/22) di InterContinental Jakarta, Pondok Indah.

Menurut Sucipto, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, integritas merupakan nilai yang tidak bisa ditawar. Ia bahkan menyebut pihaknya sebagai ‘pelayan masyarakat’, sehingga wajib memberikan yang terbaik.

“Hal ini telah dibuktikan dengan sertifikasi ISO 37001 yang didapatkan DJKI. ISO 37001 adalah bagian dari capaian untuk membangun *mindset* juga karakter SDM di DJKI menjadi lebih berintegritas, sekaligus menjadi pedoman yang akan mengantarkan kami untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” Sucipto menjelaskan.

**“Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, integritas merupakan nilai yang tidak bisa ditawar. Tidak boleh hanya satu orang, semua harus terlibat untuk mengawal, melaksanakan, menjalankan, dan menjaga ISO yang sudah kita dapatkan.”**

Setidaknya, rangkaian upaya telah ditempuh pihaknya untuk mendukung program DJKI Kemenkumham. Peningkatan SDM, misalnya, telah dicapai dengan mempersiapkan program beasiswa dari strata satu hingga tiga dan Guru KI (RuKI). Upaya lain, yaitu penataan arsip digital yang saat ini tengah berlangsung; juga

dukungan manajemen kepada direktorat teknis dalam hal membangun POP-Hak Cipta, POP-Hak Merek, maupun Mobile IP Clinic yang telah terselenggara di hampir seluruh provinsi Indonesia.

“Kemudian, ada program penguatan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Terselenggara secara masif, kegiatan ini bisa menghadirkan 1000 peserta. Keberhasilan ini, perlu dijaga dan dilanjutkan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya nilai kekayaan intelektual,” kata Sucipto.

## Ingin Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

Sucipto ingin melanjutkan capaian 2022 dengan terus mendukung meningkatkan sistem pelayanan publik. Adapun menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan, pihaknya akan terus mengakomodasi direktorat DJKI Kemenkumham dalam meneruskan sejumlah program, seperti Mobile IP Clinic, DJKI Mengajar, dan RuKI.

Pada Mobile IP Clinic, meski mekanisme akan diserahkan pada masing-masing kanwil, DJKI harus hadir untuk memantau, mengevaluasi, dan memonitoring. Sementara itu, melalui DJKI Mengajar, Yasonna Mendengar, atau RuKI, edukasi tentang kekayaan intelektual juga dapat jadi lebih baik lagi lewat kolaborasi antara DJKI dengan lembaga kementerian.

“Ini adalah bagian dari komitmen Sekretariat DJKI Kemenkumham untuk mendukung dari sisi perencanaan, anggaran, sarana, dan prasarana. Termasuk di





dalamnya adalah bagaimana pemeriksaan dapat difasilitasi dengan baik,” Sucipto menambahkan.

Sembari tetap menjaga ISO 37001, ia menilai bahwa DJKI perlu melanjutkan digitalisasi terhadap arsip, sebab merupakan bagian dari dokumen negara yang harus dilindungi. Saat ini, penataan digital DJKI sudah mencapai 60%.

Di sisi lain, ada juga penguatan sosialisasi lewat media sosial melalui tim humas. Menurut Sucipto, media sosial merupakan pintu keluar bagi informasi. Publikasi secara masif dan kerja sama dengan berbagai media massa dapat dilakukan untuk memberikan pembelajaran, salah satunya bahwa KI adalah bagian dari ekonomi.

“Di sini, humas akan berperan untuk mendorong peningkatan dan penguatan pelayanan publik. Mereka akan terjun langsung di tingkat kabupaten, provinsi, maupun kota, supaya masyarakat bisa memahami peran KI,” ujar Sucipto.

## Ingin Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

DJKI Kemenkumham terus mempersiapkan diri menuju *World Class IP Office*. Salah satunya, dengan mempersiapkan ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu—SMM); dan Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan—SMAP).

Sucipto mengungkapkan, ISO 9001:2015 maupun ISO 37001:2016 telah menjadi bagian dari Program Unggulan 2023. Ia beranggapan, sebenarnya predikat ini akan



Foto:  
Dok. DJKI  
Kemenkumham

secara otomatis tersemat, begitu ada peningkatan standarisasi pelayanan publik dalam DJKI. Saat ini, keduanya masih dalam tahap audit.

Mempersiapkan SDM yang berintegritas kemudian menjadi strategi yang diambil Sucipto, untuk mempertahankan dan mencapai sertifikasi ini. Memberikan contoh terlebih dulu, tentu sebuah keniscayaan.

“Intinya adalah membangun sistem bersama-sama, dengan komitmen yang sama. Jika SDM-nya sudah tertata, profesional, dan bertanggung jawab, dampaknya layanan publik meningkat. Untuk mewujudkannya, tidak boleh hanya satu orang, semua harus terlibat untuk mengawal, melaksanakan, menjalankan, dan menjaga ISO yang sudah kita dapatkan. Kemenkumham dan NKRI adalah milik bersama. Kita jaga dan wujudkan pelayanan publik yang

bagus, bermanfaat, serta berkesinambungan. Mari tinggalkan warisan, mumpung masih diberi amanah,” Sucipto melanjutkan.

“Kemenkumham dan NKRI adalah milik bersama. Kita jaga dan wujudkan pelayanan publik yang bagus, bermanfaat, serta berkesinambungan. Mari tinggalkan warisan, *mumpung* masih diberi amanah.”

**“Kemenkumham dan NKRI adalah milik bersama. Kita jaga dan wujudkan pelayanan publik yang bagus, bermanfaat, serta berkesinambungan. Mari tinggalkan warisan, *mumpung* masih diberi amanah.”**



## Capaian Kinerja DJKI

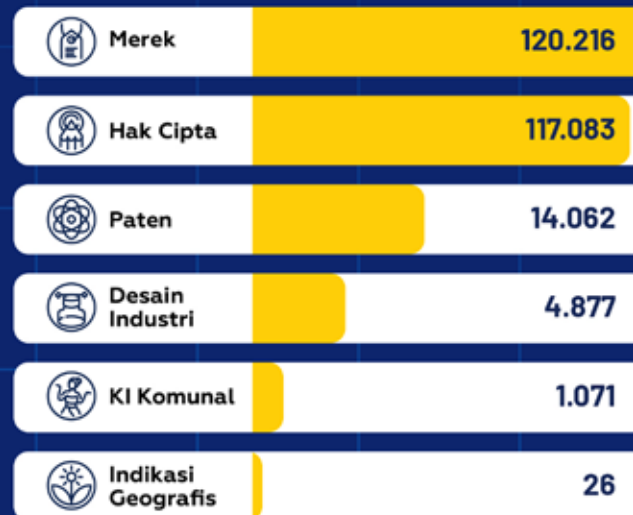
# 2022



Jumlah  
Permohonan  
**Kekayaan  
Intelektual**

## 257.335

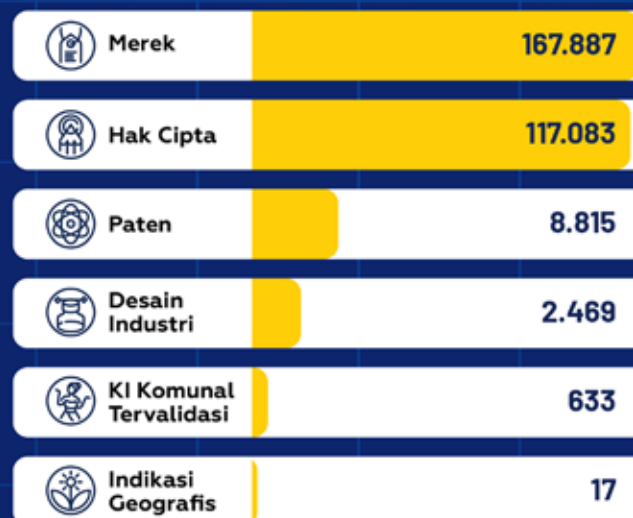
Meningkat **26,41%**  
dibandingkan tahun 2021



Jumlah  
Penyelesaian  
Permohonan  
**K.I.**

## 296.904

Meningkat **14,91%**  
dibandingkan tahun 2021



Saat ini ada **121** Indikasi Geografis (IG) yang terdaftar di Indonesia  
**106** berasal dari Indonesia, **15** berasal dari Luar Negeri.



Kontribusi DJKI terhadap  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## Rp 805.681.673.387

### Capaian Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan Akses *Budapest Treaty on The International Recognition of The Deposit of Microorganisms for The Purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest Mengenai Pengakuan Internasional Deposit Mikroorganisme untuk Kepentingan Prosedur Paten)





## Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

**46** Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

**25** Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI

**187** Penutupan Situs / Url Illegal



Selama 2022 ada **87** pusat perbelanjaan yang sudah tersertifikasi oleh DJKI karena bebas dari penjualan barang yang melanggar kekayaan intelektual / barang palsu.

## Mobile Intellectual Property Clinic

Bertujuan untuk mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat sekaligus meningkatkan awareness akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

**37** Kegiatan

**33** Provinsi

**9.747** Peserta



## DJKI Mengajar

Upaya DJKI untuk mengenalkan kekayaan intelektual sedini mungkin kepada para siswa SD dan SMP. Diselenggarakan serentak di :

**500** Sekolah

**33** Provinsi

**5.000** Siswa





## Inovasi DJKI di Tahun 2022



[hakcipta.dgip.go.id](https://hakcipta.dgip.go.id)

### Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC)

Pencatatan hak cipta yang diproses secara otomatis dengan waktu penyelesaian kurang dari 10 menit sehingga lebih efektif dan efisien.



[merek.dgip.go.id](https://merek.dgip.go.id)

### Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP Merek)

Perpanjangan merek, permohonan petikan merek, pencatatan lisensi merek kini diproses secara otomatis dengan waktu penyelesaian kurang dari 10 menit.



[pdki-indonesia.dgip.go.id](https://pdki-indonesia.dgip.go.id)

### Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)

Menampilkan publikasi A dan B paten secara *full text*, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi kekayaan intelektual secara lengkap.



[pdlm.dgip.go.id](https://pdlm.dgip.go.id)

### Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM)

Berisi informasi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait penyanyi, musisi, serta produser rekaman.

Bisa dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan royalti musik Indonesia.



[marketplace.dgip.go.id](https://marketplace.dgip.go.id)

### Intellectual Property Marketplace

Platform e-commerce yang menghubungkan para pemilik kekayaan intelektual dengan investor.



## Prestasi DJKI di Tahun 2022



**Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.**  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Top Leader on Digital Implementation 2022



**Bapak Ir. Razili, M.Si., CGCAE.**  
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Top Leader on Digital Implementation 2022



**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**  
Top Digital Implementation 2022  
Level Star 5



**MEDIA HKI meraih  
BRONZE WINNER**  
Kategori : Owned Media - Sub Kategori : E- Magazine  
Public Relations Indonesia Awards 2022



**Video Profil DJKI meraih  
SILVER WINNER**  
Kategori : Owned Media - Sub Kategori : Video Profil  
Public Relations Indonesia Awards 2022



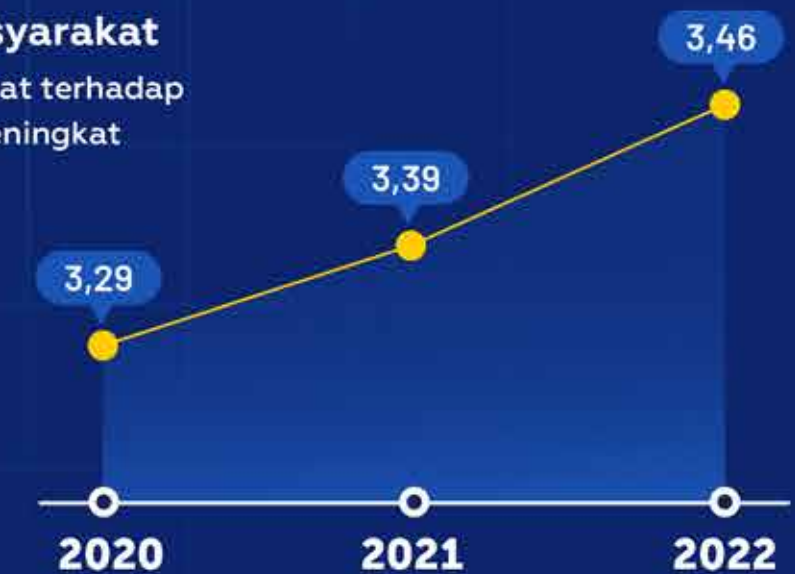
**Nilai SAKIP**  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintahan



**Indeks RB**  
Reformasi Birokrasi

## Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan DJKI juga terus meningkat setiap tahunnya.



Di tahun 2022,  
DJKI juga mendapatkan  
sertifikat ISO 37001 : 2016  
Sistem Manajemen Anti  
Penyuapan  
dengan hasil  
Nihil Temuan





Sepanjang tahun 2022, DJKI telah memberikan sejumlah penghargaan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat atas kontribusinya dalam **memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional**.

#### KEMENTERIAN

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

#### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI SELURUH INDONESIA

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| • Kota Makassar          | • Kabupaten Bone     |
| • Kabupaten Tana Toraja  | • Kabupaten Sinjai   |
| • Kabupaten Toraja Utara | • Kabupaten. Soppeng |
| • Kabupaten Wajo         | • Kabupaten Gowa     |

#### PERGURUAN TINGGI

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| • Universitas Islam Bandung  | • Universitas Sam Ratulangi       |
| • Universitas Indonesia      | • Universitas Negeri Malang       |
| • Universitas Gadjah Mada    | • Universitas Trisakti            |
| • Universitas Diponegoro     | • Universitas Tridianti Palembang |
| • Universitas Brawijaya      | • Universitas Surabaya            |
| • Universitas Andalas        | • Universitas Padjadjaran         |
| • Institut Teknologi Bandung | • Universitas Negeri Jakarta      |
| • Institut Pertanian Bogor   | • Universitas Muhammadiyah        |
| • Universitas Sumatera Utara | Yogyakarta                        |

#### ORGANISASI MASYARAKAT & INSTANSI LAINNYA

- Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
- Paguyuban Wayang Orang Bharata
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraja
- Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali



# 2023

## TAHUN MEREK

Membangun Kesadaran  
Cinta & Bangga Merek  
Indonesia



# Anggoro Dasananto, Menolak Tergerus Arus

Ada pekerjaan rumah yang menantang: mengawal perlindungan hak cipta di tengah derasnya arus digitalisasi.

**B**ertransformasi atau tergerus. Adagium itu dipegang erat oleh Anggoro Dasananto. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri di DJKI Kemenkumham ini memiliki pekerjaan rumah yang menantang: mengawal perlindungan hak cipta di tengah derasnya arus digitalisasi.

Di era serba digital, upaya perlindungan hak cipta menghadapi tantangan berlipat ganda. Kemudahan dalam bertukar data dan informasi tanpa batas membuat sebuah karya lebih mudah disebar, digandakan, dan dikomersialisasikan tanpa sepengetahuan penciptanya.

Apalagi, suatu karya tidak lagi mengambil bentuk tradisional yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, melainkan beralih wujud dalam bentuk digital. Misalnya, konten lawakan yang disampaikan seorang komika di kanal Youtube-nya, karya seni *non-fungible token* (NFT) yang dibuat oleh seorang desainer, atau musik dalam format digital yang disebar lewat beragam aplikasi-gratis hingga berbayar.

Sampai hari ini, masih ada kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta bagi karya digital. Anggoro, yang sehari-hari berkutat dengan pelayanan hukum hak cipta, tidak mau tergerus arus perubahan. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta demi mengakomodasi perlindungan hak cipta bagi para seniman dan kreator digital pun menjadi salah satu target besarnya pada 2023 ini.

Menurutnya, hanya ada dua pilihan. Bertransformasi atau tergerus oleh arus. "Tak ada gading yang tak retak. Kita perlu pengaturan yang lebih bagus lagi dengan penguatan khusus untuk karya digital, baik itu *joke*, NFT, konten Youtube, agar para seniman dengan sewajarnya menerima hak royaltinya," kata Anggoro.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah banyak ditemukan contoh pelanggaran terhadap hak cipta karya digital, yang dapat dijadikan contoh kasus dan diperkuat pengaturannya melalui revisi UU Hak Cipta.



Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

Sampai hari ini, masih ada kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta bagi karya digital.

Sejak sekarang, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pun mulai mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi, praktisi, seniman, dan pihak lain yang terkait. Audiensi dengan berbagai kelompok tersebut akan dirangkum dalam Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum usulan revisi UU diajukan dan dibahas bersama DPR.

"Isu apa saja yang berpotensi muncul, termasuk bagaimana menyelesaikan *dispute* (sengketa) terkait konten digital, apa saja

Dalam Tahun Hak Cipta, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri berhasil mengimplementasikan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC). Sistem daring tersebut diluncurkan pada 20 Januari 2022 dan telah beroperasi sepanjang tahun lalu.

sanksinya, serta siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa itu, akan diatur. Para seniman mohon bersabar dan mendukung," ucap Anggoro.

## Beragam Inovasi

Inovasi untuk mengarungi arus digitalisasi sudah dimulai sejak 2022. Dalam tahun yang dinobatkan sebagai 'Tahun Hak Cipta' ini, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri berhasil mengimplementasikan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC). Sistem daring tersebut diluncurkan pada 20 Januari 2022 dan telah beroperasi sepanjang tahun lalu.

Aplikasi POP-HC memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif untuk lebih mudah dan cepat mengurus administrasi perlindungan hak ciptanya. Proses pencatatan hak cipta yang dulunya memakan waktu enam bulan sampai satu tahun kini cukup diselesaikan di bawah sepuluh menit. Sampai awal



2023, tercatat ada 117.083 permohonan yang telah diselesaikan, melampaui target yang ditetapkan.

“Sepanjang tahun lalu, kami juga banyak memberikan pendampingan teknis kepada para pencipta yang mengajukan permohonan, seperti lewat webinar, pendampingan di Mobile IP Clinic (Klinik Kekayaan Intelektual), dan kegiatan lainnya,” Anggoro menambahkan.

Pekerjaan rumah belum selesai. Ke depan, sistem POP-HC masih perlu penyempurnaan untuk lebih memudahkan pemohon dalam mengurus permohonan hak cipta. “Kami berencana menambah fitur-fitur supaya aplikasi itu lebih *user friendly*. Kalau pemohon bisa mengaksesnya dengan lebih mudah, kualitas pelayanan publik bisa lebih baik,” tutur Anggoro.

Selain POP-HC, direktorat yang dipimpin oleh Anggoro juga membangun Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu.

Aplikasi *big data* yang berisi informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait sebuah karya musik itu dikembangkan bersama dengan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

PDLM terhubung dengan Sistem Informasi Lagu Musik (SILM) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN berwenang mengelola hak ekonomi pencipta dengan cara menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti lagu atau musik dari para pengguna komersial karya tersebut kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.



## Cita-Cita Kawasan Karya Cipta

Selain melakukan inovasi digital, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri juga memiliki pekerjaan rumah lain, yaitu mencanangkan Kawasan Karya Cipta pada tahun 2024. Lewat program tersebut, setiap provinsi diharuskan memiliki suatu daerah yang ditetapkan menjadi pusat kebudayaan, wisata, dan pameran karya cipta.

Semua kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 34 provinsi pun ditugaskan untuk melakukan pemetaan daerah yang dapat dijadikan Kawasan Karya Cipta.

Menurut Anggoro, setiap daerah memiliki kesenian dan budaya tertentu yang bisa dijadikan daya tarik wisata. Pelindungan kekayaan intelektual terhadap kearifan lokal di kawasan khusus itu diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Ia mencontohkan, Kota Ambon, Maluku, yang telah ditetapkan sebagai Kota Kreatif Kategori Musik oleh Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). “Bentuknya nanti bisa bermacam-macam, ada yang menjadi kawasan musik seperti di Ambon, ada kawasan perupa, kawasan literasi, dan lain-lain,” kata Anggoro.



Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

Setiap daerah memiliki kesenian dan budaya tertentu yang bisa dijadikan daya tarik wisata. Pelindungan kekayaan intelektual terhadap kearifan lokal di kawasan khusus itu diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.





Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

## Sejumlah Catatan Pencapaian Direktorat Merek dan IG

Melibatkan seluruh direktorat, kesuksesan ini merupakan capaian bersama, karena terbangunnya sinergitas, baik teknis dan fasilitatif.

**D**irektur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua percaya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan sumbangsih besar dalam suksesnya 16 program unggulan DJKI Kemenkumham. Melibatkan seluruh direktorat—baik dalam kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual, Yasonna Mendengar, hingga proses mendapatkan sertifikat ISO—kesuksesan ini merupakan capaian bersama, karena terbangunnya sinergitas, baik teknis dan fasilitatif.

Kurniawan memberi contoh, saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan 167.887 permohonan merek. Angka ini terwujud, karena adanya perombakan besar pada durasi penyelesaian permohonan merek, dari yang mulanya sepuluh bulan, menjadi rata-rata tujuh bulan. Percepatan yang terjadi dalam tiga tahun

terakhir ini, rupanya lebih tinggi dari rerata negara ASEAN, yang mencapai 9,5 bulan.

“Kami sudah mengevaluasi kinerja para pemeriksa merek dan melakukan percepatan atas penyelesaian permohonan merek. Dulu, masyarakat berpendapat bahwa mendapatkan sertifikat itu sulit dan lama. Nah, pada 2022, kami dapat mengeluarkan sertifikat merek dalam waktu tujuh bulan,” kata Kurniawan di sela wawancaranya.

Saat ini, telah berjalan tiga fitur aplikasi kekayaan intelektual khusus hak merek, yaitu Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP-Merek), Persetujuan Otomatis Petikan Resmi Merek, dan Persetujuan Otomatis Pencatatan Lisensi Merek (POP-Lisensi Merek). Sebagai upaya revolusi digital DJKI, POP-Merek mempermudah dan mempersingkat proses perpanjangan, hanya dalam sepuluh menit. Inovasi ini, lanjut Kurniawan, amat diapresiasi masyarakat, termasuk para konsultan hukum KI.

Ada pula *disagreement* mengenai kelas barang dan jasa yang hanya perlu menunggu persetujuan. Selain mendorong *disagreement*, pada 2022, Direktorat Merek dan IG sudah berhasil menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis pemeriksaan banding merek yang

Saat ini, telah berjalan tiga fitur aplikasi kekayaan intelektual khusus hak merek, yaitu Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP-Merek), Persetujuan Otomatis Petikan Resmi Merek, dan Persetujuan Otomatis Pencatatan Lisensi Merek (POP-Lisensi Merek).





selama ini tidak ada; serta penyusunan rekomendasi pemeriksaan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

2022 sendiri menjadi tahun yang baik bagi pencapaian pendaftaran produk indikasi geografis. Pada tahun ini, telah ada 17 produk IG terdaftar; lebih besar dari target awal 12 pendaftaran produk. DJKI juga telah berhasil melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produk-produk IG yang sudah terdaftar, sebanyak delapan produksi di seluruh Indonesia.

“Dan kami informasikan, pada kunjungan kami ke Italia, kami sudah memfasilitasi salah satu produk IG Indonesia namanya Kakao Berau berasal dari Kalimantan Timur. Kami tahu, di sana mereka sangat berminat dengan kualitas kakao.

Jadi nanti di Italia, khususnya di Kota Modica, akan menunjuk Kakao Berau ini supaya bisa memasok bahan baku kakao yang berasal dari Indonesia,” Kurniaman menambahkan.

Serupa dengan merek, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan substantif IG pun telah dilakukan. Harapannya, pada 2023 prosesnya akan lebih sederhana, sehingga memungkinkan lebih banyak IG akan terdaftar.

“Di Eropa itu, misalnya Italia, sudah diangkat 700-an IG. Di Prancis sudah di 700-an. Jumlah IG kita masih di 121. Untuk mendorong itu, kita akan segera melakukan sosialisasi dan membuat penyusunan dokumen deskripsi yaitu lebih sederhana. Itu beberapa di antaranya, selain kita memang secara umum telah menyukseskan capaian istimewa DJKI,” ujar Kurniaman.

## Rangkaian Program Baru 2023

Memasuki Tahun Merek, Direktorat Merek dan IG akan berupaya membangun kesadaran cinta dan bangga terhadap merek Indonesia. Hal ini dilakukan, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang tidak kalah berkualitas.

Terdapat sejumlah program unggulan yang sudah dicanangkan, yaitu One Village One Brand. Dalam program ini, DJKI akan menyasar satu wilayah atau daerah di setiap provinsi untuk mengusung satu merek yang mereka miliki; kemudian didaftarkan secara kolektif. Dengan cara ini, setidaknya seluruh provinsi Indonesia akan memiliki merek kolektif.

“Yogya Mart itu sudah berhasil dan sudah menembus pasar internasional. Lebih mudah mempromosikan satu merek yang digunakan oleh beberapa pelaku UMKM, karena pemerintah bisa mendukung promosinya. Jadi, nantinya produk-produk dalam negeri itu bisa lebih bersaing,” tutur pria kelahiran Nias, 12 Januari 1975.

Program selanjutnya, yaitu Geographical Indication Drafting Camp atau GI Promoting Camp, yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk IG. Becermin dari negara Eropa, di mana produk IG sangat berkontribusi terhadap perekonomian negara (*wine*, cokelat, atau keju); ia berharap hal serupa juga terjadi di Indonesia—seperti halnya produk kopi.

“Kalau soal kualitas, kopi Indonesia



itu selalu menang dalam kontes-kontes. Namun, yang kurang adalah mempromosikan kopi-kopi kita, seperti Kopi Gayo, Kopi Toraja, atau Kopi Bajawa. Itu bagus sekali. Kemudian ada Lada Putih Muntok dari Bangka Belitung, atau yang sudah tembus pasar Jepang, misalnya Cilembu dari Jawa Barat,” Kurniaman menambahkan.

Namun, di tengah kesuksesan program DJKI 2022 dan optimisme menyambut 2023, tak dapat dimungkiri, masih ada pekerjaan rumah yang tersisa. Kurniaman mengingat, pihaknya pernah menerima semacam review dari KPK, bahwa masih ada *backlog system* akibat perubahan undang-undang yang masih belum diselesaikan. Selain itu, ia juga tak

menampik bahwa masih ada beberapa permohonan yang tertinggal di sepanjang 2019-2022; serta permohonan IG yang masuk, tetapi belum ditindaklanjuti akibat pandemi.

“Pada saat pandemi, pemeriksaan IG harus sedikit tersendat karena tim ahli tidak bisa turun ke lapangan. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah lebih bisa *full time* untuk melakukan pekerjaan itu. Satu lagi, kami akan mendorong Komisi Banding Merek yang sekarang juga sudah mulai terjadi *backlog* di sana karena banyaknya permohonan permohonan banding yang belum disidangkan. Nanti kami akan berkoordinasi,” Kurniaman menerangkan.

## Inovasi Baru

Kurniaman menegaskan, DJKI tidak akan pernah berhenti melakukan inovasi. Pengembangan aplikasi untuk mempermudah—merupakan sebuah keniscayaan. Seperti halnya untuk mempermudah perpanjangan merek dan lisensi, dengan catatan: bersifat tidak substantif. Ada pula aplikasi persetujuan otomatis pada layanan pascapermohonan, yaitu perubahan alamat dan lisensi. Pengembangan ini dilakukan, menindaklanjuti proses persetujuan yang sebelumnya masih berjalan manual (melalui surat).

Dengan pengembangan yang baru, pemohon cukup masuk ke dalam

“Kalau soal kualitas, kopi Indonesia itu selalu menang dalam kontes-kontes. Namun, yang kurang adalah mempromosikan kopi-kopi kita, seperti Kopi Gayo, Kopi Toraja, atau Kopi Bajawa. Itu bagus sekali. Kemudian ada Lada Putih Muntok dari Bangka Belitung, atau yang sudah tembus pasar Jepang, misalnya Cilembu dari Jawa Barat,” Kurniaman menambahkan.

aplikasi dan memasukkan sejumlah data. Secara otomatis, alamat akan langsung berubah. Hal serupa juga berlaku pada POP-Lisensi Merek dan Intellectual Property Online (IPROLINE) yang berkoordinasi dengan Direktorat TI.

“Misalnya, sekarang ini dalam Undang-Undang Merek dan IG ada istilah Merek 3D, sedangkan sertifikat yang ada sekarang belum bisa menampilkan etiket atau label merek dalam bentuk tiga dimensi. Nanti kita kembangkan ke situ termasuk misalnya hologram. Hologram itu nanti akan kita buat dalam sebuah sertifikat. Ini sedang dalam pengembangan,” ujar Kurniaman.

Pada akhirnya, menyambut Tahun Merek, Kurniaman berpesan untuk terus mencintai produk dalam negeri.

“Nasionalisme kita harus kuat, karena tanpa nasionalisme perekonomian kita tidak akan kuat. Harapan saya, gunakanlah produk dalam negeri. Untuk DJKI, semoga lebih baik lagi prestasi luar biasa yang sudah ada di tahun 2022. Pada 2023, dengan program unggulan yang sudah dicanangkan itu lebih berhasil lagi. Harapan kita semua dan tetap sehat itu yang penting,” pungkas Kurniaman.



# Melihat Sisi Lain Tantangan dan Potensi Pengembangan Paten di Tanah Air

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang ingin terus meningkatkan sistem paten di Indonesia agar menjadi sistem yang berkualitas internasional.

2022 menjadi batu loncatan bagi DJKI Kemenkumham, khususnya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Empat target indikator kinerja 2022 berhasil dicapai dengan baik, bahkan dengan indikasi lebih dari 100%. Salah satunya adalah peningkatan permohonan paten yang diterima pada 2022 sebesar 12,79%.



“Total permohonan paten yang kita terima di tahun 2021 itu 12.467. Pada 2022 ini kita menerima permohonan paten sebanyak 14.062,” kata Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang DJKI Kemenkumham, Yasmon.

Yasmon pun memaparkan sejumlah capaian lain Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang. Secara bersamaan, pada 2022, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang berhasil menyelesaikan Rencana Undang-Undang Paten hingga menjadi salah satu Program Legislasi Nasional untuk tahun 2023. Capaian lainnya, yaitu penyusunan juklak dan juknis untuk Komisi Banding Paten. Hal ini penting, mengingat setelah bertahun-tahun, Komisi Banding Paten akhirnya memiliki juklak dan juknis.

Kemudian, pada pengujung 2022, direktorat ini berhasil

merealisasikan anggaran hingga 99,32%. Bandingkan dengan target persentase di tingkat nasional atau Kemenkumham yang mencapai 95%. “Tentunya, berkat kerja sama dan dukungan yang luar biasa dari semua pihak. Dari sekretariat dan seluruh jajaran direktorat, sehingga seluruh program dan kegiatan yang sudah dijadwalkan dapat terlaksana dengan baik,” Yasmon menambahkan.

Namun, tak sampai di situ. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai institusi. Dalam kegiatan ini, tercatat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang telah mengirimkan kurang lebih 300 narasumber.

“Ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa karena kita dapat memenuhi permintaan dari berbagai pemangku kepentingan untuk bisa memberikan penguatan di lembaga litbang, perguruan tinggi, dan kementerian institusi lainnya berkaitan dengan paten,” Yasmon menerangkan.

## Kontribusi Paten dalam Peningkatan Ekonomi

Yasmon menegaskan, semangat dan kerja keras memberikan pelayanan terbaik tidak akan berhenti pada 2022 saja. Pihaknya telah menilai potensi-potensi para inventor tanah air dalam meningkatkan kemampuan paten, sehingga nantinya dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi Indonesia. Adapun potensi ini, juga dapat dirasakan secara langsung bagi inventor tanah air.

Misalnya, lewat pengajuan

permohonan paten di dalam negeri oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan institusi lainnya. Yasmon sendiri melihat masih rendahnya permohonan paten dalam negeri sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang.

Salah satu strategi yang diambil, yaitu menguatkan pelayanan di internal Direktorat Paten, baik itu yang bersifat administratif maupun substantif.

Yasmon pun ambil langkah lanjutan. Salah satu strateginya: menguatkan pelayanan di internal Direktorat Paten, baik itu yang bersifat administratif maupun substantif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan paten; sekaligus mendorong para inventor dalam negeri agar melakukan penelitian yang berorientasi paten serta melakukan upaya komersialisasi terhadap invensinya.

Tantangan selanjutnya terkait perkembangan teknologi yang luar biasa, seperti *artificial intelligence*, *metaverse*, nanoteknologi, hingga bioteknologi.

Dengan melesatnya bidang-bidang ilmu ini, permohonan yang masuk ke Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang akhirnya terus meningkat. Kondisi inilah yang kemudian harus diperhitungkan, mengingat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang juga perlu mempersiapkan regulasi yang relevan dan tepat sasaran.





## Patent Examiner Goes to Campus, Program Pemeliharaan Inovasi

Untuk mendorong para peneliti dan inventor tanah air di lembaga litbang, perguruan tinggi Indonesia, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang mengagas Patent Examiner Goes to Campus. Pada kegiatan ini, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang akan mengirimkan pemeriksa paten senior untuk melakukan pembinaan selama kurang lebih dua minggu. "Diharapkan para

pemeriksa paten senior akan bisa membantu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di kampus-kampus untuk mengelola kekayaan intelektualnya," ujar Yasmon.

Dengan berbagai capaian dan target tahun 2023, Yasmon memiliki harapan tinggi pada Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang. Terlebih, agar capaian gemilang 2022 dapat terus meningkat pada 2023.

"Kita berharap jumlah permohonan paten yang kita terima dan proses pada 2023 bisa jauh lebih banyak. Penyelesaian permohonan paten,

nilai dan jumlahnya juga bisa semakin tinggi. Selain itu, kebutuhan masyarakat terkait layanan paten dapat dipenuhi semua. Inovasi-inovasi yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan kualitas pengelolaan sistem paten di Indonesia, baik secara administratif atau substantif," pungkas Yasmon.



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# Ayo Catatkan Karya Ciptamu di [hakcipta.dgip.go.id](https://hakcipta.dgip.go.id)



## Kini Pencatatan Karya Cipta Semakin Cepat!



Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) diluncurkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022. POP HC merupakan sistem untuk mempercepat proses pencatatan karya cipta.



Pencatatan Karya Cipta melalui POP HC sebagai Bukti Kepemilikan



# Bersama-sama Memperkuat Sinergitas untuk Sukseskan Capaian 2023

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Kemenkumham terus berupaya untuk mengoptimalkan seluruh program kerja. Salah satunya, dengan bekerja sama antardirektorat maupun *stakeholder* lain.

Sejak 2022 ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta, sejumlah kegiatan unggulan telah sukses dilaksanakan. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Sri Lastami menyebutkan, sepanjang 2022, ada empat wilayah yang ditetapkan sebagai tuan rumah Roving Seminar Kekayaan Intelektual, DJKI Kemenkumham, yaitu Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta—dengan total 8.248 peserta.

Program kedua, yakni Mobile IP Clinic di 33 provinsi Indonesia, yang berakhir di Palembang, Sumatera Selatan. Program ketiga, Yasonna Mendengar yang sukses diselenggarakan di empat provinsi Indonesia. Menurut Lastami, pada program ini, terdapat kenaikan pada tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat. Salah satu alasannya, selain dapat memberikan masukan secara langsung, program ini juga memungkinkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah pada saat yang sama.

“Contohnya, pada waktu itu ada yang mengeluh, ‘kok, merek saya nggak keluar-keluar?’. Begitu dicek,

ternyata bukannya tidak keluar, dia hanya lupa nomor dan email. Setelah kami bantu, baru nama mereknya terlihat,” Lastami bercerita.

Paten Drafting Camp menjadi program keempat yang diselenggarakan oleh DJKI Kemenkumham di empat kota, meliputi Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Malang. Program ini menghasilkan 314 dokumen paten; di mana pada 2022—Indonesia menduduki peringkat kesepuluh dari seluruh kantor kekayaan intelektual anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), dengan jumlah permohonan mencapai 3.249.

Program kelima, RuKI (Guru KI) yang diikuti oleh 346 guru KI hasil seleksi dari kantor wilayah seluruh Indonesia. Adapun sebagian besar mereka adalah penyuluh hukum. Program keenam, Webinar IP Talks sebanyak 13 kali dan melibatkan 15.853 peserta. Lastami menjelaskan, demi efisiensi dan efektivitas, Webinar IP Talks

mulanya diadakan pada saat pandemi.

“Jadi, walaupun ada Covid-19, kita tetap melakukan kewajiban dengan baik. Kemudian ada pula Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Di KIK ini, telah tercatat 573 KIK dari seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, kita juga sukses dengan DJKI Mengajar. Itu adanya di Makassar (*offline*) dan *online* dari kota lain. DJKI Mengajar dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan peserta sebanyak 5.000 siswa,” kata Lastami.

## Demi Kesejahteraan Masyarakat

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, DJKI Kemenkumham terus berupaya untuk mengoptimalkan seluruh program kerja. Lastami mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan *website* KI Komunal, sehingga nantinya dapat memberikan sumbangsih pada pembaruan data nasional.

Selain mengatur *database* KIK, PP ini juga mengatur jenis KIK; penjaan dan pemeliharaan KIK oleh menteri, menteri/ kepala lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah; pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK; pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; serta pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjaan KIK.







Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

Desember 2022, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) sebagai dasar hukum inventarisasi KIK yang dimiliki Indonesia. PP ini menjadi bagian dari perlindungan KIK nasional yang secara simultan dapat memperkuat perlindungan defensif.

**“Kita harapkan Indonesia tidak lagi menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Kita adalah negara yang sangat kaya dengan budaya, seni, dan lain sebagainya. Paling tidak, melalui sistem kekayaan intelektual, semua itu**

**bisa ikut memberikan sumbangsih ekonomi dan secara langsung meningkatkan harkat kesejahteraan masyarakat setempat,” lanjut Lastami.**

Sementara itu, optimasi aplikasi konsultan kekayaan intelektual diharapkan dapat selesai sesegera mungkin, mengingat salah satu tugas Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI adalah memonitoring kinerja konsultan KI. Kini, konsultan KI sudah berjumlah 1.101.

Sesuai penetapan 2023 sebagai Tahun Merek—pihaknya juga mendukung terselenggaranya program One Village, One Brand. “Nanti banyak pendaftaran satu wilayah, kabupaten, atau kota, bisa memiliki *brand* unggulan yang juga bisa meningkatkan perekonomian

wilayah setempat. Kemudian, ada penetapan Kawasan Karya Cipta dan peningkatan angka permohonan melalui POP-HC,” Lastami menambahkan.

Lastami pun optimis, pencapaian 2023 akan lebih baik. Sinergitas dan kerja sama yang baik antar direktorat maupun *stakeholder* lain, tentu dibutuhkan. Melalui penentuan Kawasan Karya Cipta, misalnya. Masyarakat yang terdiri atas seniman, sastrawan, atau pekerja seni dapat lebih memahami bahwa karya mereka dilindungi oleh sistem KI, sekaligus memiliki potensi komersialisasi. Dengan demikian, mereka dapat lebih semangat dan fokus dalam berkarya.

“Memang, harus ada peningkatan dari upaya yang sudah ada, sehingga dapat lebih sempurna lagi. Masyarakat yang dilindungi, dapat mengambil langkah lanjutan komersialisasi karya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujar Lastami.

## IP Academy: Tingkatkan Kapasitas SDM di Bidang KI

DJKI Kemenkumham tengah melakukan koordinasi dengan WIPO untuk mempersiapkan Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional (IP Academy). IP Academy didirikan untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang KI di tingkat nasional maupun regional. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan kerja sama, keduanya akan menandatangani dokumen pernyataan kehendak (*letter of intent*).

Lastami menjelaskan, saat ini DJKI sedang dalam proses melakukan pembahasan draf Lol dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, DJKI juga diminta untuk menetapkan *focal point* atau koordinator IP Academy yang nantinya, berdedikasi penuh dalam pelaksanaan proyek.

“Termasuk juga kita harus mempersiapkan *trainer* melalui program yang telah disahkan oleh WIPO, modul-modul melalui program Training of Trainers (TOT), juga ke depannya RuKI ini lebih optimal dalam melaksanakan diseminasi melalui akademi. Harapannya, akan lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga ada standar pengajaran atau diseminasi ini bisa lebih baik,” kata Lastami.



# Ikhtiar Menegakkan Hukum Kekayaan Intelektual

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham diminta untuk mendorong tumbuhnya kepercayaan, baik skala nasional maupun internasional terhadap perlindungan KI di Indonesia.

**P**enegakan hukum kekayaan intelektual (KI) masih menyisakan segudang persoalan. Saat ini, Indonesia masih dilabeli negara Priority Watch List (PWL) yang dikeluarkan United States Trade Representative (USTR) atau Kamar Dagang Amerika Serikat karena memiliki tingkat pelanggaran KI yang dinilai berat. Belum lagi, ancaman pelanggaran KI dari barang-barang yang beredar di dunia *e-commerce*.

Foto:  
Dok. DJKI  
Kemenkumham



Meski demikian, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham tak patah arang. Sejak dilantik Mei 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Anom Wibowo langsung dibebani tugas yang tak mudah. Yasonna memintanya untuk mendorong tumbuhnya kepercayaan, baik

skala nasional maupun internasional terhadap perlindungan KI di Indonesia. Dengan pengalaman sebelumnya di lingkungan kepolisian, Anom yang ketika dilantik berpangkat Komisaris Besar Polisi ini, diharapkan dapat menegakkan hukum di dunia KI.

“Menjaga peraturan, melindungi peraturan, melakukan

pengawasan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, baik paten, merek, hak cipta dan lain-lain,” ujar Menteri Yasonna saat pelantikan Anom, seperti dikutip dari situs resmi DJKI.

Kinerja apik Anom terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, pada 2022, ia berhasil melebihi target yang ditugaskan.

Ditemui beberapa waktu lalu, Anom menjelaskan, sepanjang 2022 pihaknya ditargetkan untuk menyelesaikan 20 kasus. Adapun anggaran yang diberikan sebesar Rp4 miliar.

Mengejar penyelesaian perkara hingga 20 kasus dalam setahun sendiri bukan hal yang terlalu sulit. Sebab, menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat hampir 200 tunggakan perkara terkait KI. Artinya, perkara KI ini sangatlah banyak.

Anom mengatakan, sepanjang 2022, pihaknya telah berhasil menyelesaikan lebih dari 50 perkara dari temuan KPK tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 perkara telah mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, 187 perkara di *e-commerce*—salah satunya perdagangan barang yang melanggar KI—juga telah berhasil ditutup, diturunkan, dan diblokir. Ada pula 35 perkara yang telah berhasil dimediasi; serta sertifikasi ke 70 pusat perbelanjaan yang dilakukan 33 kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham dan satu dari pemerintah pusat, sesuai program unggulan DJKI. Angka ini, jauh melebihi target 34 pusat perbelanjaan.

“Capaian 2022 sudah melampaui target yang diberikan,” ujar Anom.



## Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Kendati melebihi target pada 2022, Anom mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya, status Indonesia sebagai negara PWL yang dikeluarkan oleh USTR atau Kamar Dagang Amerika Serikat, karena memiliki tingkat pelanggaran KI yang dinilai berat.

Untuk bisa keluar dari PWL, perlu ada perubahan regulasi yang perlu diikuti penegakan hukum perkara KI di Indonesia.

Dunia internasional menghendaki Indonesia untuk mengubah delik aduan menjadi delik umum. Namun, perubahan itu, tak mudah dilakukan. Sebab, hal itu berada di luar kewenangan Kemenkumham. Perubahan itu harus didorong keputusan politik, karena berada dalam wilayah legislasi yang diampu DPR.

Selain itu, perlu ada perubahan regulasi lain, yaitu terkait koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini pun sulit dilakukan karena ketentuan tersebut berada di ranah Kemenkeu.

Di sisi lain, lanjut Anom, perlu ada penegakan hukum terhadap

perkara KI. Terkait hal ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparat penegak hukum untuk menjaga pelabuhan udara, pelabuhan laut, serta perbatasan negara agar tidak terjadi penyelundupan barang palsu. Adapun penegakan hukum tersebut dilakukan secara bersamaan dengan terus

**Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparat penegak hukum untuk menjaga pelabuhan udara, pelabuhan laut, serta perbatasan negara agar tidak terjadi penyelundupan barang palsu.**

Foto:  
Freepik



menyebarkan kampanye masif agar masyarakat tidak membeli produk palsu atau bajakan.

Masuknya Indonesia sebagai anggota Interpol turut membantu penyelesaian perkara KI; sekaligus membantu Indonesia keluar dari daftar PWL. Karena Indonesia sudah menjadi anggota Interpol, pihaknya dapat berkoordinasi secara administrasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Bila memiliki informasi mengenai pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pihaknya dapat berkoordinasi untuk proses penangkapan.

“Perkara KI ini dinilai serius oleh Interpol ditandai dengan berada di peringkat empat dari 20 kejahatan yang diakui Interpol,” Anom menambahkan.

## Pengawasan Peredaran Barang Palsu di E-commerce

Selain persoalan PWL, pengawasan peredaran barang palsu di *e-commerce* juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang menantang. “Saat ini, perubahan bisnis dari *offline* menuju *online* itu begitu masif. Ini jadi tantangan kita untuk meningkatkan pengawasan,” kata Anom.

Mengantisipasi risiko tersebut, pihak Anom telah mempersiapkan inovasi untuk meningkatkan pengawasan barang di dunia *e-commerce*. Pihaknya akan membeli alat yang dapat memantau peredaran barang palsu di dunia *e-commerce*. Untuk mempresentasikan hal ini, ia akan mengundang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ada pula pembuatan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kominfo dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk rencana kerja ini. Anom mengatakan, pihaknya mendorong adanya PKS antara pemegang merek atau pemegang sertifikat KI dengan pihak pengelola *e-commerce*. Ke depannya, cara-cara ini diharapkan dapat dengan cepat menurunkan dan memblokir entitas yang memperjualbelikan barang palsu di *e-commerce*.

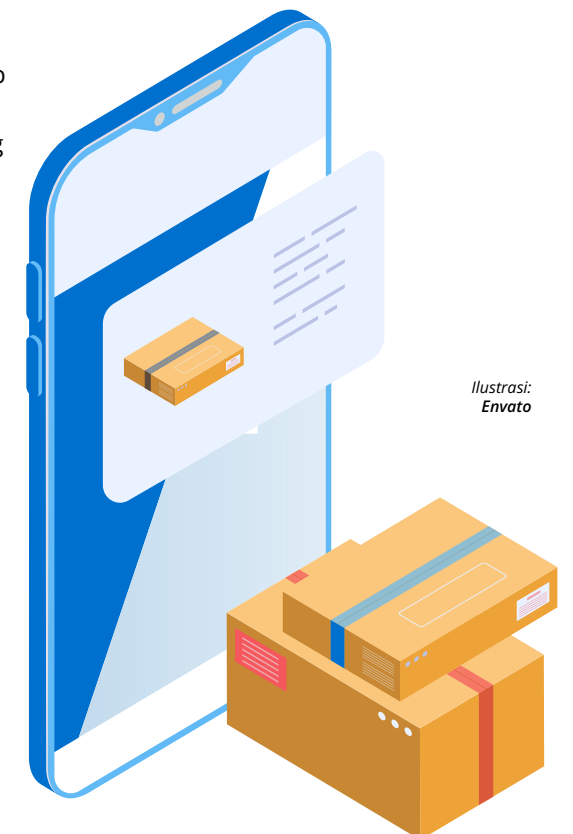
“Kalau kami bisa mengawasi perdagangan *e-commerce* ini dan bisa menindak barang palsu, ini bakal jadi sumbangan terbesar kami untuk melindungi, tak hanya pedagang dengan KI, tetapi juga melindungi warga negara Indonesia yang ingin membeli barang di *e-commerce*,” ungkap Anom.

Lebih banyak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat kanwil kemudian diperlukan, untuk meningkatkan penegakan hukum KI. Pasalnya, penyelesaian sengketa KI ini tidak bisa diwakilkan. Secara ideal, setiap kanwil sudah memiliki satu hingga dua unit tim PPNS yang menangani pelanggaran masalah KI.

Anom menegaskan, sejak 2021, pihaknya telah menyusun dan mengusulkan ketentuan mengenai manajemen penyelidikan. Namun, sampai saat ini usulan ketentuan itu belum disahkan. Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rancangan jabatan fungsional bagi PPNS. Dengan diberlakukannya ketentuan itu, Anom berharap dapat meningkatkan minat PNS untuk aktif menjadi PPNS.

“Sehingga penanganan perkara KI bisa menyeluruh tidak hanya di pusat saja. Ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Anom.

**Kalau kami bisa mengawasi perdagangan *e-commerce* ini dan bisa menindak barang palsu, ini bakal jadi sumbangan terbesar kami untuk melindungi, tak hanya pedagang dengan KI, tetapi juga melindungi warga negara Indonesia yang ingin membeli barang di *e-commerce*,” ungkap Anom.**



Ilustrasi:  
Envato



# Mempersiapkan DJKI yang Responsif terhadap Transformasi Digital



Hadir mendukung pelayanan masyarakat, sejumlah transformasi telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi DJKI selama 2022. Beberapa di antaranya menasar permohonan merek, desain industri, dan hak cipta.

Teknologi informasi merangkul seluruh bentuk inovasi dan kreativitas dalam satu wadah: aplikasi. Direktorat Teknologi Informasi DJKI menyadari betul fungsi ini. Hadir mendukung pelayanan masyarakat, sejumlah transformasi telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi DJKI selama 2022. Beberapa di antaranya menasar permohonan merek, desain industri, dan hak cipta.

Dalam wawancaranya, Direktur Teknologi Informasi Direktorat TI DJKI, Dede Mia Yusanti mengakui, POP-Merek menjadi salah satu inovasi yang berkontribusi signifikan terhadap misi pelayanan masyarakat. POP-Merek ini merupakan lanjutan dari program POP-Hak Cipta yang lebih dulu disosialisasikan, guna mendongkrak angka permohonan KI.

“Jadi, pertama kita lakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Pada prinsipnya, semua aplikasi sudah berjalan dan dapat digunakan, baik oleh pemohon maupun petugas di DJKI. Kedua, pengembangan IP *marketplace*. Pada 2022, kami juga melakukan implementasi kerja sama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Regional Afrika/African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) berkaitan dengan aplikasi sistem e-hakcipta dan telah dilakukan instalasi di ARIPO,” ujar Dede.



Foto: Dok. DJKI Kemenkumham

Sejumlah transformasi ini, lanjut Dede, berhasil mengantarkan DJKI pada pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satu yang membanggakan, adalah ‘*Top Digital Implementation 2022 #LevelStar5*’ –naik peringkat dari empat bintang yang didapat pada 2021. Beberapa bulan lalu, aplikasi e-hakcipta juga mendapatkan pengakuan dari WIPO. Untuk hal ini, Dede ingat betul bahwa saat instalasi, perwakilan WIPO yang hadir menyampaikan apresiasi karena sistem e-hakcipta dinilai lebih mudah dan efisien ketimbang aplikasi yang dimiliki WIPO.

“Tentunya, masih perlu perbaikan dan peningkatan yang dapat mengoptimalkan kinerja teman-teman di DJKI dan memudahkan

pemohon dalam melakukan permohonan kekayaan intelektual,” Dede menambahkan.

## Penelusuran KI Kian Mudah

Sebenarnya ada sejumlah hal penting dan mendasar dalam upaya perlindungan KI. Menurut Dede, sistem *database* yang lengkap dan mudah diakses, merupakan salah satunya. Pasalnya, data publikasi ini dapat menjadi dasar maupun landasan seseorang, ketika ia ingin mengajukan permohonan hak cipta.

Maka, merespons pentingnya proses penelusuran data publikasi KI, pihaknya segera melakukan

pengembangan dan optimalisasi PDKI. Jadi, siapa pun dapat melihat secara lengkap publikasi KI—sekaligus melakukan penilaian awal potensi pemanfaatan maupun pelanggarannya.

“Dengan *database* publikasi paten, misalnya, pemohon dapat melihat apakah sudah ada pemanfaatan dari paten tersebut atau belum? Masyarakat bisa melihat data paten, termasuk potensi pelanggarannya, ketika mereka ingin menggunakan sesuatu, melakukan penelitian, atau menjual sesuatu,” Dede menjelaskan.

Pada 2022, Direktorat Teknologi Informasi DJKI sendiri telah melakukan audit internal teknologi yang dilakukan oleh



inspektorat jenderal. Audit ini merupakan satu kewajiban bagi instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenkumham. Di samping itu, juga telah dilakukan kunjungan dan *monitoring* ke seluruh kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham.

Di tengah beragam capaian yang sudah diraih, 2022 lantas menjadi tahun yang spesial, mengingat pada tahun ini, ada beberapa aturan baru yang harus dilaksanakan oleh Direktorat TI. Aturan tersebut mulai dari kewajiban izin dalam membeli atau menghasilkan produk baru, seperti aplikasi lisensi; izin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi; serta izin dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

“Itu yang menjadi salah satu tantangan. Apalagi dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk kita menggunakan produk dalam negeri. Masih banyak pula PR yang membutuhkan waktu. Namun, beberapa hal yang bisa saya sebutkan, yaitu pembangunan dan pengembangan aplikasi, IP *marketplace* yang tidak hanya ada, tetapi juga digunakan secara optimal,” kata Dede.



## Menyebarkan Manfaat Lewat Program Kerja 2023

### “ Sosialisasi, inovasi, dan pengembangan produk menjadi bagian integral dari program kerja yang akan dilakukan Direktorat TI sepanjang 2023. ”

Di luar pengembangan aplikasi, Direktorat TI tak henti melakukan kegiatan sosialisasi guna memberi tahu masyarakat mengenai platform yang dimiliki DJKI. Platform ini, dapat dimanfaatkan untuk proses komersialisasi hasil inovasi yang telah didaftarkan. Dengan demikian, Dede berharap—kehadiran direktorat ini secara khusus dapat bermanfaat bukan hanya bagi internal DJKI dan masyarakat, melainkan juga bagi institusi pemerintah lain yang sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat.

Menyambut perkembangan zaman, pada 2023 DJKI kemudian akan melakukan pengembangan *artificial intelligence* (AI) pada penelusuran paten. Hal ini dilakukan mengingat di negara-negara lain, AI telah banyak dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan KI, seperti merek, desain industri, hingga paten.

“Ada PR yang belum terlaksana, yaitu kerja sama dengan kantor paten Eropa untuk menyediakan *database* (European Patent Office-EPO). *Database* ini dapat dimanfaatkan teman-teman pemeriksa dalam melakukan penelusuran pada saat mereka melakukan pemeriksaan substantif paten,” ucap Dede.

Meneruskan capaian 2022, Dede memaparkan sejumlah program kerja pada 2023. Belajar dari pengalaman, sejak awal bahkan menjelang 2023, pihaknya sudah mulai melakukan proses *clearance*, permohonan (izin), dan persetujuan dari Kementerian Komunikasi Informasi. Langkah ini sebagai antisipasi, agar jangan sampai karena ketidaktahuan, keterlambatan dalam hal penggunaan barang impor kembali terulang—seperti tahun sebelumnya.

Program kedua, berhubungan dengan inovasi untuk mempermudah masyarakat melindungi hak kekayaan intelektualnya. Pada 2022, POP-Merek sebenarnya telah memiliki tiga modul: perpanjangan merek, lisensi merek (pencatatan lisensi merek), dan petikan resmi merek. Nah, tahun ini, Direktorat TI akan menambahkan beberapa modul POP-Merek, meliputi POP-Bukti Prioritas Merek, POP-Status Merek, POP-Status Banding Merek, dan POP-Keterangan Tertulis Perpanjangan Waktu Merek.

Dari berbagai pertemuan di tingkat ASEAN, Dede menyebutkan, pihaknya juga sudah menyetujui Indonesia akan menjadi tuan

rumah perhelatan ASEAN IPR Help Desk. Ini menunjukkan, luasnya cakupan manfaat DJKI dari lingkup nasional hingga ASEAN.

Dede melanjutkan, pihaknya tengah mempersiapkan Traditional Knowledge Digital Library (TKDL). Di beberapa negara, TKDL digunakan untuk melakukan penelusuran paten yang berkaitan dengan misalnya, obat tradisional, jamu, maupun kategori obat herbal lain.

“Indonesia kaya akan kekayaan tradisional. Selain itu, sebagaimana kita ketahui, kita sudah mempunyai *database* KI komunal. Ternyata, beberapa negara ASEAN tertarik untuk mengetahui bagaimana kita membangun *database* KIK. Jadi, kita juga ingin berbagi dengan negara-negara ASEAN,” lanjut Dede.

Sesuai arahan Plt. Dirjen KI, direktorat ini akan mencanangkan Sertifikasi ISO 270001 dan ISO 20000. ISO 270001 berkaitan dengan sistem keamanan teknologi informasi, sementara ISO20000 berhubungan dengan manajemen layanan teknologi.

“Kami mengharapkan kerja sama yang baik antara unit-unit teknis yang memanfaatkan aplikasi maupun produk lainnya dari Direktorat TI untuk kepentingan DJKI dalam melayani pendaftaran, permohonan, dan pencatatan KI. Sejauh ini, kita selalu berkoordinasi dan berharap kerja sama itu akan semakin baik,” ungkap Dede menutup pembicaraan.



# Tahun 2023 sebagai Tahun Merek

- Tahun 2023 telah dicanangkan sebagai **Tahun Merek Nasional dengan Tema Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia**. Harapannya, pencanangan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat daerah melalui pemanfaatan KI.



- Untuk pertama kalinya Hak Cipta dan Merek dalam negeri mencapai lebih dari 100.000 permohonan dalam jangka 1 tahun, oleh karena itu pada saat refleksi akhir tahun 2022 DJKI memberikan apresiasi kepada pemohon Hak Cipta dan Merek ke 100.000.



## TOP DIGITAL AWARD 2022



- Karena peningkatan ini, **Indonesia masuk dalam Top 10 untuk 2 jenis Permohonan, di antara negara-negara middle-income WIPO: Merek (Ranking 2) dan Paten Sederhana (Ranking 10).**



- Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI meraih **3 prestasi pada ajang Top Digital Award 2022**. Raihan itu ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan Plt. Dirjen KI sebagai **Top Leader on Digital Implementation 2022**, dan DJKI meraih **Top Digital Implementation 2022 #LevelStar5**.



- Keberhasilan yang diraih DJKI ini merupakan hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran kami dalam mengimplementasikan teknologi digital pada pelayanan publik kekayaan intelektual.



- DJKI berupaya mengoptimalkan seluruh layanan publik kekayaan intelektual baik permohonan awal dan pasca permohonan KI dilakukan secara daring.



- DJKI juga menerapkan pada seluruh layanan KI yang sifatnya administratif, seperti perpanjangan merek, permohonan pencatatan lisensi, dan lain sebagainya, dilakukan persetujuan otomatis.



- Kami telah melaunching aplikasi **POP Merek** untuk mempermudah perpanjangan merek, permohonan petikan resmi merek, serta perjanjian lisensi merek.





# Program Unggulan DJKI Tahun 2023

## 01 MENINGKATKAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBESAR 17% DI TAHUN 2023

### • Safari Menteri Hukum dan HAM RI

Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang akan didengar langsung oleh Menkumham dalam pembenahan layanan KI.

### • DJKI Aktif Belajar Mengajar

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait KI yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan Kemenkumham untuk ikut serta dalam mewujudkan KI sebagai poros pemulihan ekonomi nasional di era digital ekonomi.

### • Indonesian IP Academy

DJKI akan melakukan kerjasama teknis yang menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan ekosistem kekayaan intelektual (KI) bersama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

## 02 MENINGKATKAN JUMLAH HKI NASIONAL YANG DILINDUNGI SEBESAR 8%

### • One Village One Brand

Satu Desa Satu Merek, bertujuan mendorong setiap daerah untuk dapat memiliki merek kolektif. Merek kolektif mampu menjadi sebuah langkah kreatif dan inovatif dalam upaya melindungi Merek suatu produk dari sebuah desa yang memiliki keseragaman jenis produk yang dihasilkan/diproduksi.

### • Prioritas Nasional KI Komunal

Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kedaulatan kebudayaan serta kepemilikan KI Komunal Indonesia; memperkuat database perlindungan hukum KI Komunal serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KI Komunal Indonesia; mencegah terjadi pemanfaatan KI Komunal tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil; membantu penguatan ekonomi wilayah melalui diseminasi, kerja sama antar *stakeholder* dalam memetakan potensi ekonomi KI Komunal.

### • GI Drafting Camp

Kegiatan ini difokuskan untuk menyelesaikan beberapa permohonan IG yang sudah masuk dan potensi IG khususnya dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

### • Mobile IP Clinic dan IP Clinic

Kegiatan ini merupakan komitmen DJKI bersama seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia, dan para pemangku kepentingan daerah untuk bekerja sama membantu dan melindungi KI masyarakat di seluruh Indonesia khususnya mendorong merek kolektif.

### • Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024

Kawasan karya cipta suatu tempat yang memiliki kreasi/karya cipta yang bersifat tradisional maupun kontemporer dan menjadi identitas suatu wilayah serta dilakukan upaya pelestarian yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi.

### • Patent Examiner Goes to Campus

Pada kegiatan ini DJKI akan menyiapkan tim ahli untuk ditugaskan pada perguruan tinggi untuk membantu para civitas akademik dalam hal drafting paten.

## 03 MENYELESAIKAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN HKI 100%

### • Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan peredaran barang palsu dan pemberantasan barang bajakan. Apabila suatu pusat perbelanjaan telah tersertifikasi, maka pusat perbelanjaan tersebut hanya dapat menjual barang-barang asli.

## 04 PENYELESAIAN PERMOHONAN HKI 99%

### • POP Merek (Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek)

POP Merek saat ini berlaku untuk tiga layanan pasca permohonan merek. Diantaranya terdiri dari perpanjangan perlindungan merek, pencatatan lisensi dan petikan resmi. Ketiga-raya dapat dilakukan secara otomatisasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mempercepat perekonomian Indonesia.

### • Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI

Sertifikasi ISO 9001:2015 menjadi salah satu langkah guna memastikan akuntabilitas kinerja DJKI yang berbasis nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Hal ini juga sebagai kewajiban dan janji penyelenggara negara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

### • Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Sistem TI

### • Sertifikasi ISO 20000 Manajemen Layanan TI





# Dengan Persetujuan Otomatis, Layanan DJKI Semakin Cepat dan Praktis

Kini 4 layanan kekayaan intelektual di DJKI sudah menerapkan **POP (Persetujuan Otomatis Permohonan)**, yaitu :

1. Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2. Perpanjangan Merek
3. Pencatatan Lisensi Merek
4. Petikan Resmi Merek



Perpanjangan Merek  
Anda **Disetujui**



# 2023

## Tahun Merek

Membangun Kesadaran Cinta  
& Bangga Merek Indonesia





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi **[PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID](https://PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID)**

agar tahu merek Anda memiliki persamaan  
dengan merek yang sudah terdaftar  
sebelumnya.

